



Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat, Seimbang, Inklusif, & Berkelanjutan

Rembug Roadmap Gayeng

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah

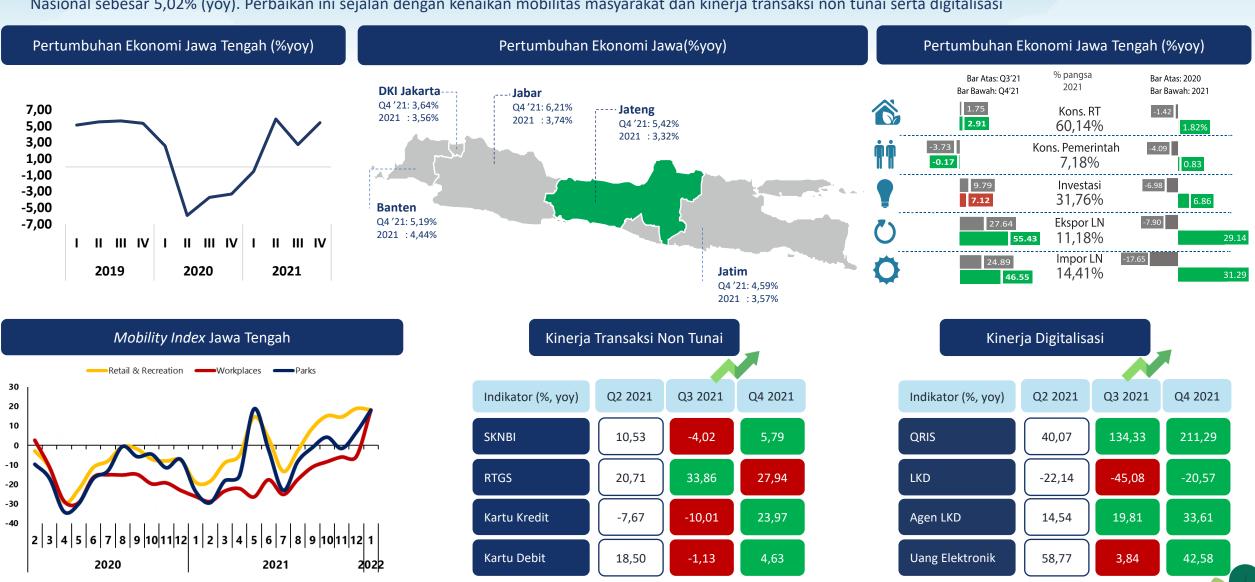
24 Februari 2022

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan PAD

Sumber: Google Mobility Index



Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan IV 2021 tumbuh 5,42% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 2,73% (yoy), dan lebih tinggi dibandingkan Nasional sebesar 5,02% (yoy). Perbaikan ini sejalan dengan kenaikan mobilitas masyarakat dan kinerja transaksi non tunai serta digitalisasi



Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025



Bank Indonesia merumuskan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) yang berorientasi penuh pada upaya membangun ekosistem yang sehat sebagai pemandu perkembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Kelima visi SPI dijabarkan menjadi 5 inisiatif dengan pendekatan berbasis indutri, *regulatory*, dan kolaborasi.

Lima visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 menjadi target akhir *(end-state)* dari arah kebijakan jangka panjang Bank Indonesia.

VISI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA (SPI) 2025

- SPI 2025 mendukung **integrasi ekonomi-keuangan digital nasional** sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendorong inklusi keuangan
- SPI 2025 mendukung **digitalisasi perbankan** sebagai lembaga utama dalam ekonomikeuangan digital melalui *open banking* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan
- SPI 2025 menjamin *interlink* antara *fintech* dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow-banking melalui pengaturan teknologi digital (seperti API), kerja sama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan
- SPI 2025 menjamin **keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat** melalui penerapan KYC& AML-CFT,
 kewajiban keterbukaan data/informasi/bisnis publik, dan penerapan *regtech* dan *suptech*dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan
- SPI 2025 menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas







Versi 29 November 2021

PERTUMBUHAN EKONOMI YANG KUAT, SEIMBANG, INKLUSIF, & BERKELANJUTAN

PERCEPATAN & PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH MELALUI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMDA DALAM MENDUKUNG TATA KELOLA KEUANGAN, KEUANGAN INKLUSIF, DAN PERKONOMIAN NASIONAL

OUTCOME Optimalisasi PAD • Peningkatan Layanan Publik • Tata Kelola

OUTPUT • Peningkatan Penerimaan & Realisasi Belanja Non Tunai • Peningkatan Elektronifikasi Transaksi Pemda • Peningkatan Jumlah Pemda Digital

AREA
PENGEMBANGAN • Transaksi Pendapatan • Transaksi Belanja

Ketentuan

Penguatan Landasan Hukum

- Keputusan Presiden
- Ketentuan Mekanisme Kerja Kelembagaan (Pusat & Daerah)
- Ketentuan Implementasi ETPD di Daerah
- Pedoman Teknis

Kelembagaan

Penguatan Kelembagaan Pusat - Daerah

- Penguatan koordinasi Pusat dan Daerah
- Sinergi program

Implementasi

Perluasan Digitalisasi

- Perluasan pemanfaatan instrument dan kanal pembayaran ETPD
- Perluasan kerja sama bank dan non bank serta e-commerce
- Peningkatan kualitas SDM Pemda, PJP, dan awareness masyarakat
- Inovasi ETPD

Infrastruktur

Perluasan Infrastruktur & Mekanisme

- Percepatan pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi
- Ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur Sistem Pembayaran (a.l. kanal, instruman)
- Optimalisasi pemanfaatan SIP2DD sebagai Pusat Portal Informasi P2DD
- Integrasi dan interoperabilitas sistem informasi pengelolaan keuangan Pemda

Informasi & Data

Penguatan Monitoring

- Pengembangan & pemanfaatan data dan informasi dalan SIP2DD
- Peningkatan kualitas Indeks ETPD
- Pengembangan Data P2DD
- Penguatan kuaitas asesmen & monitoring untuk masukan kebijakan ETPD

EKOSISTEM DIGITAL

EDUKASI & SOSIALISASI

SDM

SINERGI INISIATIF NASIONAL

• SPBE

SNKI

• BSPI 2025

• Satu Data Indonesia

• RPJMN 2020-2024

• Perluasan Jaringan Telekomunikasi

Roadmap TP2DD





- Permendagri)
- **Launching Paket Kebijakan** Satgas P2DD dlm FEKDI April 2021.
- Penerbitan Pedoman Championship
- Penerbitan **Pedoman Tehnis** P2DD
- Launching dan Implementasi awal SIP2DD
- 25% Pemda di Indonesia berada pada tahap Digital
- **Opini audit WTP** atas laporan keuangan



50% Pemda di Indonesia berada pada tahap Digital

2022

- Penyelenggaraan Rakornas P2DD
- Launching Framework & **Roadmap P2DD**
- Launching dan Pelaksanaan
- **Championship P2DD** Implementasi Penuh SIP2DD
- Integrasi sistem informasi dan keuangan daerah
 - **Opini audit WTP** atas laporan

keuangan

akses jaringan 4G **Championship P2DD**

2023

Opini audit WTP atas laporan keuangan

75% Pemda di Indonesia

□ **50% Pemda** mendapatkan

berada pada tahap Digital

- 2025
 - 100% Pemda di Indonesia berada pada tahap Digital
- ☐ **100% Pemda** mendapatkan akses jaringan 4G
- ☐ Championship P2DD
 - **Opini audit WTP** atas laporan keuangan

Posisi IETPD Per Juli 2021:

- Daerah Digital: 115 (21%)
- Daerah Maju: 270 (49%)
- Daerah Berkembang: 151 (29%)
- Daerah Inisiasi: 6 (1%)

Kriteria Pemda di Tahap Digital

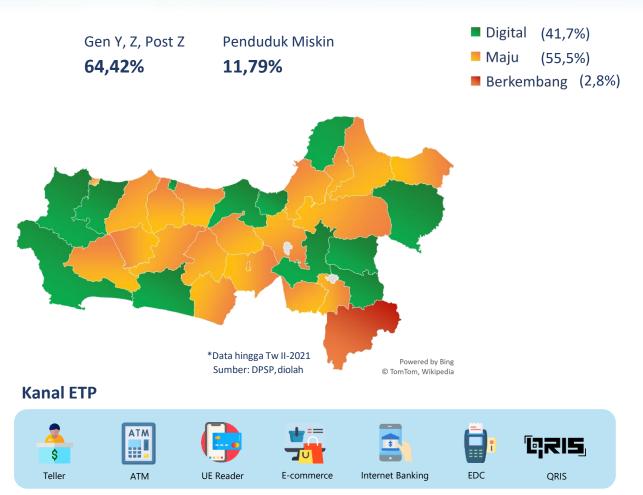
- Transaksi pendapatan sangat beragam (>20)
- Kanal pembayaran relatif beragam (>5) dan sudah menerapkan channel QRIS atau E-Commerce
- Sudah menerapkan SP2D dan sudah mengintegrasikan CMS
- Sudah memiliki regulasi terkait P2DD



Kondisi ETP di Jawa Tengah



Berdasarkan data triwulan-II 2022 telah terdapat 41,7% pemda yang sudah berada pada kategori digital, dengan berbagai kanal pembayaran. Sebagian besar merupakan daerah perbatasan. Jumlah pemda digital ditargetkan akan terus tumbuh seiring dengan potensi penduduk, dimana 64,42% merupakan generasi Y, Z, dan post Z.



No	Kab/Kota	Kategori	No	Kab/Kota	Kategori
1	Kota Surakarta	Digital	19	Kota Tegal	Maju
2	Kabupaten Sragen	Digital	20	Kabupaten Banjarnegara	Maju
3	Kabupaten Karanganyar	Digital	21	Kabupaten Batang	Maju
4	Kota Salatiga	Digital	22	Kabupaten Purworejo	Maju
5	Kabupaten Brebes	Digital	23	Kabupaten Magelang	Maju
6	Kota Pekalongan	Digital	24	Kabupaten Demak	Maju
7	Kabupaten Blora	Digital	25	Kabupaten Pati	Maju
8	Kabupaten Jepara	Digital	26	Kota Magelang	Maju
9	Kabupaten Kendal	Digital	27	Kabupaten Kudus	Maju
10	Kabupaten Boyolali	Digital	28	Kabupaten Sukoharjo	Maju
11	Kabupaten Kebumen	Digital	29	Kabupaten Pekalongan	Maju
12	Kota Semarang	Digital	30	Kabupaten Banyumas	Maju
13	Provinsi Jawa Tengah	Digital	31	Kabupaten Rembang	Maju
14	Kabupaten Cilacap	Digital	32	Kabupaten Semarang	Maju
15	Kabupaten Tegal	Digital	33	Kabupaten Purbalingga	Maju
16	Kabupaten Pemalang	Maju	34	Kabupaten Grobogan	Maju
17	Kabupaten Wonosobo	Maju	35	Kabupaten Temanggung	Maju
18	Kabupaten Klaten	Maju	36	Kabupaten Wonogiri	Berkembang

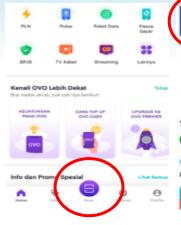


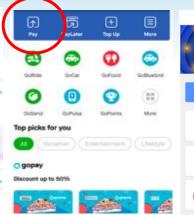
Pajak dan Retribusi dengan QRIS

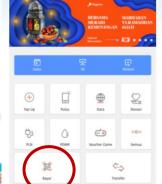












Tulisan "Bayar"

Logo"QR"

Logo "Scan"

Tulisan "Pay"



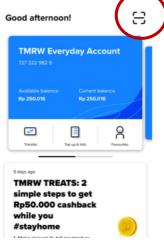
E-Wallet



Logo "QRIS"



Logo "QR"



Logo "Scan"



Logo "QR"

Limit Transaksi QRIS

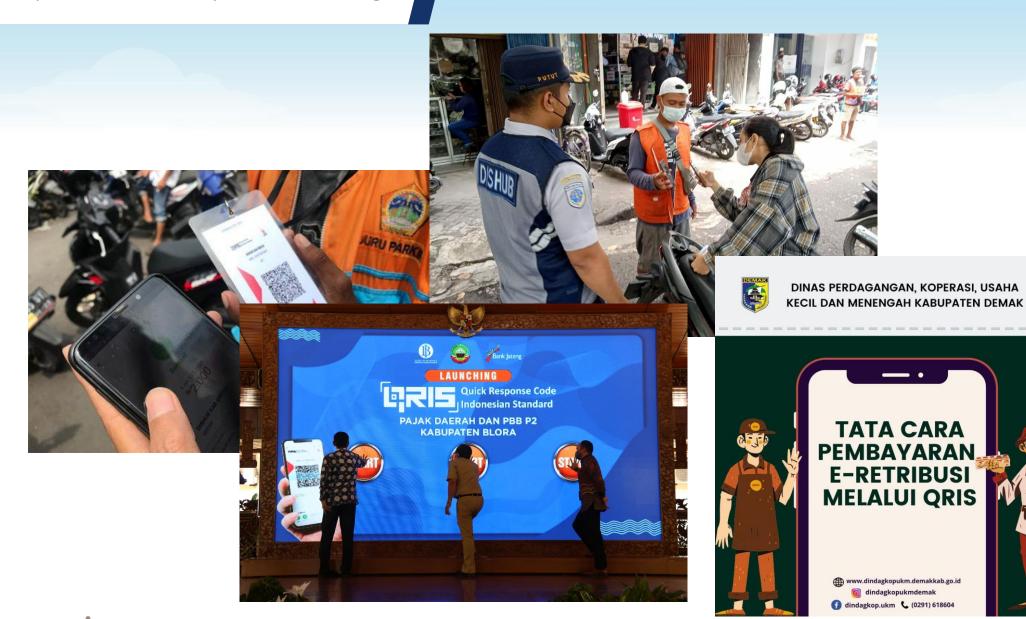
- Limit nominal transaksi yang semua 5 juta berubah menjadi **10** juta
- Limit per transaksi QRIS sesuai dengan batas nilai yang disimpan pada source of fund yang dipergunakan*
- Kebijakan mulai diterapkan pada 1
 Maret 2022

*Misalnya: UE unregistered max 2jt; UE registered mac 10jt; tabungan tergantung saldo



Implementasi QRIS pada ETP Jateng









Infratruktur IT dan Perbankan



Infrastuktur yang dimiliki oleh pemda maupun BANK RKUD belum dapat mengakomodir bervariasinya mobile payment yang dimiliki masyarakat

Kompetensi SDM Pemda



Terdapat peningkatan laporan kendala kompenetsi SDM Pemda. Oleh karena itu perlu adanya kegiatan peningkatan kapabiltas pada SDM OPD terkait

Literasi Masyarakat



Masih terdapat banyak masyarakat yang belum terliterasi mengenai sistem pembayaran non tunai









Terima Kasih

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah

Jl. Imam Bardjo SH No.4, Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50241 Telp. (024) 8310246

